



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

**Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan
Pembatalan Perjanjian Visiting Force Agreement**

Skripsi

Disusun Oleh

Rieza Tasliyah Aviandari

2017330145

Bandung
2021



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 3095/SK/BAN-PT/Akred/VIII/2019

**Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan
Pembatalan Perjanjian Visiting Force Agreement**

Skripsi

Disusun Oleh
Rieza Tasliyah Aviandari

2017330145

Pembimbing
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rieza Tasliyah Aviandari
Nomor Pokok : 2017330145
Judul : Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan Pembatalan Perjanjian *Visiting Force Agreement*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 15 Juli 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

: 

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

: 

Anggota

I'dil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Rieza Tasliyah Aviandari
Nomor Pokok : 2017330145
Judul : Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan
Pembatalan Perjanjian Visiting Force Agreement

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Jakarta, 8 Juli 2021

Pembimbing,

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Sukawarsini Djelantik, Dra., M.I.S., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rieza Tasliyah Aviandari

NPM : 2017330145

Progam Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : **Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan Pembatalan Perjanjian Visiting Force Agreement**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 8 Juli 2021



Rieza Tasliyah Aviandari

Abstrak

Nama : Rieza Tasliyah Aviandari

NPM : 2017330145

Judul : Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan Pembatalan Perjanjian Visiting Force Agreement

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan perubahan sikap yang dialami oleh Filipina terhadap kebijakan pemutusan perjanjian Visiting Force Agreement. Pemutusan perjanjian VFA sebagai pakta militer yang dilakukan oleh Filipina dengan alasan keterikatan Filipina dengan Amerika dapat dilihat sebagai bahaya dan ancaman bahwa Filipina mungkin saja akan terjebak dalam persaingan antara China dan Amerika dengan kepentingan yang berbeda. Namun keagresifan China di Laut China Selatan membuat Filipina juga takut akan kehilangan satu-satunya negara penjamin keamanannya yaitu Amerika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif dan jenis analisis deskriptif. Selain itu, akan menggunakan teori dilema aliansi oleh Glenn Snyder yang memberikan dasar untuk perdebatan ini. Menurut temuan penelitian ini, Filipina merasakan dilema karena ketakutan akan *Abandonment* dan *Entrapment* yang dirasakan pada saat bersamaan. Namun, setelah mempertimbangkan resiko dan keuntungan yang ada, Filipina memilih untuk mempertahankan VFA yang dilihat sebagai strategi Cooperate karena rasa akan *Abandonment* Filipina lebih besar dari ketakutan akan *Entrapment*. Dengan melakukan strategi Cooperate, akan mengurangi risiko akan *Abandonment* dengan menyerahkan sebagian dari risiko untuk *Entrapment* dalam konfrontasi antara Amerika dan China. Akibatnya, Filipina memilih untuk tetap berada di aliansi Amerika dan membantu Amerika dalam pertempuran dengan China karena mereka sekarang melihat China sebagai musuh bersama.

Kata kunci : Visiting Force Agreement, Kebijakan Filipina, Aliansi, Dilema Aliansi, Laut China Selatan, Entrapment, Fear of Abandonment

Abstract

Nama : Rieza Tasliyah Aviandari

NPM : 2017330145

Judul : Analysis of the Changes in Philippine Attitudes Against the Policy of Cancellation of the Visiting Force Agreement

This writing aims to analyze and explain the change in attitude experienced by the Philippines towards the policy of terminating the Visiting Force Agreement. The termination of the VFA agreement as a military pact viewed by the Philippines as a danger and threat because the ties between Philippines and America can caused the Philippines to be caught in a competition between China and America with different interests. However, China's aggressiveness in the South China Sea makes the Philippines also fear that it will lose its only security guarantor, namely America. This research was conducted using qualitative techniques and types of descriptive analysis. In addition, it will use the alliance dilemma theory by Glenn Snyder which provides the basis for this debate. According to this finding, the Philippines feels a dilemma because the fear of Abandonment and Entrapment is felt at the same time. However, after considering the risks and benefits involved, the Philippines chose to keep the VFA which was seen as a Cooperate strategy because the sense of Philippine Abandonment was greater than the fear of Entrapment. By carrying out the Cooperate strategy, it will reduce the risk of Abandonment by ceding some of the risk to be Entrap in the confrontation between America and China. As a result, the Philippines chose to remain in the American alliance and assist America in the battle with China because they now see China as a common enemy.

Keywords : Visiting Force Agreements, Philippines Foreign Policy, Alliance, Alliance Dilemma, South China Sea, Entrapment, Fear of Abandonment

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa tanpa berkat dan rahmatNya, penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Sikap Filipina Terhadap Kebijakan Pembatalan Perjanjian *Visiting Force Agreement*” tidak akan mungkin terlaksana. Penelitian ini dibuat sebagai syarat bagi kelulusan penulis di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, dengan gelar akademik Strata-1 (S1).

Penelitian ini berfokus pada perubahan sikap yang dilakukan oleh Filipina terkait kebijakan pembatalan perjanjian *Visiting Force Agreement*. Kajian ini akan berfokus pada faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi sikap Filipina. Untuk membantu membangun argumentasi, kajian ini akan menggunakan teori dilema aliansi yang diperkenalkan oleh Glenn Snyder.

Adapun, penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan, kesalahan penulisan kalimat, atau analisis yang kurang tepat, penulis meminta maaf sebesar-besarnya. Lebih daripada itu, penulis membuka pintu bagi setiap pihak yang memiliki kritik dan saran agar penelitian ini lebih maksimal. Penulis juga berharap agar setiap kesalahan dan kekurangan menjadi pedoman atau sumber referensi dalam penulisan penelitian dengan topik terkait.

Jakarta, 8 Juli 2021

Ucapan Terimakasih

Pada bagian ini akan didekasikan untuk menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berperan selama proses penulisan dan juga penyelesaian masa studi, rekan-rekan, saudara, dan pembimbing yang tidak pernah putus untuk memberi motivasi dalam bentuk apapun. Sehingga penulisan skripsi ini dapat usai sebagai syarat dari kelulusan kegiatan studi penulis di Universitas Katolik Parahyangan.

1. Puji Syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian berkat, rahmat, dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan masa studinya di Universitas Katholik Parahyangan
2. Untuk Ibu dan Oma, yaitu Liza Dewi dan Christinawati, yang selalu memberikan perhatian, bantuan dan dukungan yang tidak terhitung bagi penulis
3. Untuk keluarga yang terus memberikan dukungan bagi penulis untuk terus maju dan mencapai titik ini.
4. Untuk Mas Adrianus Harsawaskita selaku dosen pembimbing yang pada proses penulisan selalu memberikan arahan dan bimbingan terbaiknya bagi penulis dari awal pertemuan bimbingan hingga saat ini.
5. Untuk sahabat dan teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu-satu. Penulis sangat berterimakasih sudah menemani dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam prosesnya.
6. Untuk diri sendiri yang sudah berhasil dengan baik melewati apapun itu selama ini.

Jakarta, 8 Juli 2020

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel dan Gambar	vii
BAB I	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan penelitian	7
1.4. Kajian Literatur	7
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	16
1.6.1 Metode Penelitian	16
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	17
1.7 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	19
2.1 Dinamika Hubungan Filipina dengan Amerika Serikat	19
2.2 Dinamika Hubungan Filipina dengan China	27
2.3 Visiting Force Agreement dan Posisi Filipina dalam VFA	34
BAB III	44

3.1 Fear of Entrapment.....	44
3.2 Kebijakan Independen Duterte.....	50
3.3 Sikap Agresif China	53
3.4 Teori dilema aliansi	58
3.4.1 Ketergantungan secara langsung	60
3.4.2 Kepentingan Strategis	77
3.4.3 Tingkat ketegasan dalam sebuah kesepakatan.....	81
3.4.4 Kepentingan Sekutu yang Berkonflik Terbagi	89
3.4.5 Perilaku aliansi di masa lalu	92
BAB IV	95
Kesimpulan	95
DAFTAR PUSTAKA	99

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel dan Gambar	Nama	Halaman
Tabel 3.4.1	Perbandingan kekuatan militer Filipina dengan China	60

BAB I

1.1. Latar belakang masalah

Amerika merupakan sekutu terlama dan penyedia bantuan terbesar bagi Filipina. Kedua negara telah melakukan beberapa pertukaran informasi intelijen, bantuan dan pelatihan untuk membantu Filipina dalam menangani kasus kejahatan dalam negeri seperti perdagangan manusia, serangan cyber, narkoba ilegal, dan terorisme.¹ Hubungan aliansi antara Filipina dan Amerika lebih banyak berfokus pada kerjasama di bidang keamanan dan juga militer. Didukung oleh serangkaian perjanjian militer yang telah dilakukan oleh kedua negara semenjak Pakta Pertahanan Bersama (MDT) tahun 1951, Visiting Force Agreement (VFA) pada tahun 1999, hingga pada tahun 2002, hubungan keduanya tumbuh semakin dekat karena kebangkitan terorisme global saat peristiwa 9/11. Filipina telah menerima peningkatan paling dramatis dalam bantuan luar negeri Amerika di Asia Tenggara, sebagian besar untuk tujuan pemberantasan terorisme, termasuk bantuan militer serta juga bantuan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.² Namun pada 11 Februari 2020, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa ia akan mengakhiri Visiting Force Agreement (VFA).

¹ Gomez, Jim. "Philippines Notifies U.S. of Intent to End Major Security Pact." The Globe and Mail. 11 Februari 2020. <https://www.theglobeandmail.com/world/article-philippine-president-to-terminate-troop-agreement-with-us/>.

² Lum, Thomas., Niksch, Larry A. "The Republic of the Philippines: Background and U.S. Relations". Congressional Research Service. The Library of Congress. 2006

VFA sendiri merupakan perjanjian militer antara Amerika dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1998. Perjanjian ini mencakup mengenai prosedur akses yang telah disederhanakan bagi anggota layanan Amerika yang sedang dalam perjalanan bisnis resmi ke Filipina misalnya pelatihan bilateral militer antara Amerika dan Filipina, dan menyediakan serangkaian prosedur mengenai proses hukum dan penyelesaian masalah yang mungkin muncul sebagai akibat dari kehadiran pasukan Amerika di Filipina. Selain itu, VFA juga menegaskan kembali posisi kedua perjanjian lainnya yaitu Mutual Defense Treaty (MDT) dan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Tanpa VFA, kehadiran pasukan Amerika di Filipina yang berada di bawah kerangka perjanjian MDT dan EDCA harus keluar dan mencari status hukum baru.

Keputusan ini diawali karena Duterte tidak senang dengan pencabutan visa Amerika dari salah satu senator yang memimpin kampanye ‘*war on drugs*’ yaitu Ronald “Bato” dela Rosa. Pemutusan perjanjian VFA akan berlaku setelah 180 hari semenjak pengumuman yang dibuat oleh Duterte. Namun alasan sebenarnya yang melatarbelakangi keputusan ini adalah persaingan yang sedang berlangsung antara Amerika dan China atas kekuasaan dan status. Persaingan yang terjadi ditakutkan akan membentuk sistem internasional ke dalam dua tatanan paralel yang hanya didominasi oleh Amerika dan China sehingga membuat sistem internasional yang sebelumnya multipolar menjadi kembali bipolar. Hal ini menjadi pertimbangan bagi Duterte karena konsekuensi dari persaingan ini yang bersifat global dan

mempengaruhi hubungannya dengan negara lain. Duterte melihat adanya bahaya dari hubungan aliansi antara Filipina dengan Amerika.³

Duterte merupakan presiden pertama yang secara terbuka menyerukan penurunan dukungan terhadap hubungan aliansi Amerika. Ia telah mengurangi intensitas kerja sama militer dengan Amerika disaat yang bersamaan berupaya untuk meningkatkan hubungan dengan China. Pada KTT ASEAN Summit 2016, Duterte mulai mendeklarasikan perubahan dalam orientasi kebijakan luar negeri Filipina. Ia menginginkan orientasi kebijakan yang lebih bersifat independen dan tidak memihak.⁴

Hal ini berkaitan dengan upaya Duterte untuk mengembangkan kondisi infrastruktur Filipina yang terkenal buruk dan telah lama menghambat ekspansi investasi modal, Duterte kemudian beralih ke China untuk mendapatkan pinjaman guna mendanai program kampanye nya yaitu ‘Build, Build, Build’. Namun tindakan agresif dari Amerika terhadap China membuat Filipina mustahil untuk keluar dari cengkeraman imperialisme Amerika dan meningkatkan hubungannya dengan China. Sehingga membuat Duterte mengakhiri keterlibatan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat.⁵

³ Heydarian, Richard Javad. “*Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy.*” *Asian Security* 13, no. 3. 4 Agustus 2017. 220–36. <https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1354569>.

⁴ Ibid.

⁵ Heydarian. *Op.cit.*

1.2. Identifikasi Masalah

Namun pada, tanggal 2 juni 2020 masih dalam waktu percobaan pemutusan VFA, Rodrigo Duterte memutuskan untuk menangguhkan pembatalan VFA. Menteri luar negeri Filipina, Teodoro Locsin, membuat pengumuman pada hari Selasa 2 juni 2020 melalui Twitter, mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Washington dalam catatan diplomatik. Keputusan untuk menangguhkan sementara pembatalan perjanjian militer Visiting Force Agreement. Dalam surat diplomatiknya dikatakan bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan politik dan lainnya di wilayah tersebut, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dalam surat tersebut juga dikatakan bahwa pencabutan perjanjian VFA selama 6 bulan akan diperpanjang oleh Filipina selama enam bulan lagi. Setelah periode itu, kecuali ada tindakan lain yang diambil, Filipina akan kembali ke rencana semula untuk membatalkan perjanjian, yang pertama kali diumumkan pada 11 Februari 2020. Sejauh ini, Amerika Serikat telah menyambut baik keputusan tersebut. "Aliansi lama kami telah menguntungkan kedua negara, dan kami berharap dapat terus menjalin kerja sama keamanan dan pertahanan yang erat dengan Filipina," kata Kedutaan Besar Amerika Serikat di Manila dalam sebuah pernyataan.⁶ Langkah tersebut tentu saja mengejutkan beberapa pihak seperti China, keputusan Duterte ini juga meninggalkan beberapa pertanyaan apa yang membuat Duterte kembali menangguhkan pembatalan VFA.

⁶Gutierrez, Jason. "Philippines Backs Off Threat to Terminate Military Pact With U.S." The New York Times. 2 Juni 2020. <https://www.nytimes.com/2020/06/02/world/asia/philippines-military-pact-us-Duterte.html>.

Dalam jumpa pers pada Rabu 3 Juni 2020, Locsin menyatakan bahwa perintah itu datang langsung dari Presiden Rodrigo Duterte. Dia mengatakan bahwa Duterte telah berubah pikiran karena disebabkan perubahan situasi dunia yang luas dan cepat, dan pada saat pandemi ketegangan negara adidaya menjadi memuncak. Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana juga mengatakan Duterte menyadari bahwa dengan pandemi, diperlukannya kerjasama antar negara dan Filipina akan mempertahankan jadwal latihan militernya dengan Amerika untuk saat ini.⁷

Penangguhan VFA yang dilakukan oleh Duterte menggambarkan adanya perubahan sikap yang dialami oleh Duterte. Perubahan sikap ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan independen yang diterapkan oleh Duterte serta bagaimana Duterte memandang lingkungan strategis Filipina. Ia mendeklarasikan perubahan haluan dalam kebijakan luar negeri Filipina yaitu untuk menjadi lebih independen dari cengkraman Amerika serta disaat yang bersamaan membuka hubungan dengan China dan Rusia untuk melakukan bisnis, dan perdagangan terlepas dari permasalahan sengketa Laut China Selatan.⁸ Namun dengan adanya beberapa perkembangan yang terjadi di kawasan serta pandemi Covid-19 membuat Duterte mempertimbangkan kembali keputusannya. Berdasarkan pemaparan Oleh sebab itu, penulisan ini akan berupaya untuk **menganalisis determinan yang mempengaruhi perubahan sikap Duterte**

⁷ Vartavarian, Mesrob. "Populism Blindsided: America, Duterte, and the Philippine Military." – The Diplomat. for The Diplomat. 11 Juni 2020. <https://thediplomat.com/2020/06/populism-blindsided-america-Duterte-and-the-philippine-military/>.

⁸ Richard Javad Heydarian. "Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy". Asian Security, 13:3, 220-236. 2017. DOI: 10.1080/14799855.2017.1354569

terhadap kebijakan untuk menanggukkan pembatalan perjanjian Visiting Force Agreement.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan ini akan didalami dari 3 hal yaitu isu, aktor, dan waktu. Isu yang menjadi perhatian penulis adalah dilema yang dialami oleh Filipina dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Filipina dalam menentukan keputusannya. Sementara, Aktor yang akan menjadi subjek dalam penulisan ini adalah Pemerintah Filipina saat ini yaitu Rodrigo Duterte, Amerika dan juga China yang ikut terlibat. Dari segi waktu, penulis akan memfokuskan pada rentang waktu saat Rodrigo Duterte memutuskan untuk membatalkan VFA hingga Rodrigo Duterte menanggukkan pembatalan perjanjian VFA.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah bahwa dilema muncul karena adanya potensi gesekan bilateral yang disebabkan oleh kepentingan dan persepsi yang berbeda, penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan penelitian berupa :

‘Mengapa Filipina memutuskan untuk menanggukkan pembatalan perjanjian Visiting Force Agreement’

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencoba menjelaskan dan menganalisa hipotesa dari dilemma aliansi bahwa semakin tinggi tingkat campur tangan Amerika terhadap Filipina maka semakin meningkatkan Fear of Entrapment yang dirasakan oleh Filipina dan semakin agresif sikap China di Laut China Selatan maka akan meningkatkan juga Fear of Abandonment yang dirasakan oleh Filipina.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis selama menempuh masa studi sehingga dapat menjadi salah satu syarat kelulusan dan memberikan pemaparan mengenai dilema aliansi yang dialami oleh Filipina dan apa saja faktor yang menjadi pertimbangan untuk Filipina merubah keputusannya.

1.4. Kajian Literatur

Untuk memperdalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa literatur yang memberikan pemahaman mengenai analisa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Rodrigo Duterte serta memberikan fondasi untuk membangun hubungan antara faktor faktor dibelakangnya.

Dalam literatur berjudul 'The Duterte Administration appeasement policy on China and the crisis in the Philippine–US alliance' karya Renato Cruz De Castro menjelaskan mengenai bagaimana perubahan kebijakan luar negeri di bawah

pemerintahan Duterte berdampak buruk pada aliansi Filipina-Amerika⁹. De Castro berpendapat perubahan tersebut didasari oleh ketidakpercayaan Duterte bahwa Amerika tidak akan membantu Filipina jika terjadi konfrontasi bersenjata dengan China di Laut China Selatan, dan faktor geografi juga turut menentukan bahwa Filipina tidak memiliki pilihan lain selain untuk hidup berdampingan dan bahkan bekerja sama dengan China. Sehingga Duterte mengambil langkah untuk menjauhkan orientasinya dari Amerika dan lebih condong terhadap China, hal ini kemudian disebut sebagai kebijakan appeasement.

Selanjutnya dalam literatur berjudul ‘Shifting Relations in South-East Asia: The changing Philippine-Sino- American foreign relations in the early era of the Duterte administration’ karya Juda A. Jelinjek lebih mengeksplorasi bahwa kebijakan luar negeri pada masa kepresidenan Duterte lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal dibandingkan dengan eksternal.¹⁰ Alih-alih menjaga stabilitas regional, ia lebih memfokuskan orientasinya pada pembangunan dan keamanan dalam negeri seperti kejahatan terorganisir dan terorisme. Pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Duterte juga menunjukkan langkah awal reorganisasi sistem hubungan internasional unipolar. Hal ini terjadi bila sebuah negara aliansi (Amerika) tidak berhasil memberikan bantuan kepada negara yang sedang berjuang (Filipina) dengan pembangunan ekonomi dan masalah keamanan dalam negeri,

⁹ Castro. R.C.D “*The Duterte Administration’s appeasement policy on China and the crisis in the Philippine–US alliance*”. Philippine Political Science Journal, DOI: 10.1080/01154451.2017.1412161

¹⁰ Juda A. Jelinjek. “*Shifting Relations in South-East Asia: The changing Philippine-Sino-American foreign relations in the early era of the Duterte administration*”. Central European University. 2017

kemudian muncul negara dengan kekuatan baru (China) yang dianggap lebih mampu untuk membantu mereka berjalan menuju kemakmuran. Namun Duterte memahami bahwa ia tidak dapat memutuskan hubungannya dengan Amerika dan sebaliknya ia mempertimbangkan perlunya kebijakan luar negeri yang lebih independen antara China dan Amerika.

Literatur ketiga berjudul ‘Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy’ karya Richard Javad Heydarian, lebih menegaskan argumen yang dibangun oleh Jada A terkait faktor internal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan Duterte yang menginginkan untuk lebih ‘independen’ dari genggaman Amerika maupun China, hal ini menyebabkan Filipina untuk menganut strategi *equil balancing*. Heydarian berpendapat bahwa ada 5 komponen utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, diantaranya adalah kepribadian Duterte sebagai pemimpin yang populis, ketidakpercayaan terhadap kesetiaan Amerika sebagai sekutu, amarahnya terhadap kritik Obama mengenai kampanye *war on drugs*, dan yang terakhir dipengaruhi oleh iklim politik domestik dimana Duterte ingin lebih berfokus untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi.¹¹ Heydarian juga dengan jelas menggambarkan pengaruh penting politik domestik dalam kebijakan luar negeri. Munculnya orang kuat seperti Duterte berarti bahwa pembuatan kebijakan luar negeri menjadi lebih personal, karena ia telah berusaha untuk menyusun kebijakan luar negeri Filipina sesuai dengan pandangannya sendiri.

¹¹ Richard Javad Heydarian. Loc.Cit. ” Tragedy of Small Power Politics: Duterte and the Shifting Sands of Philippine Foreign Policy”

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam berupaya mengkaji isu dan menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan teori Dilema Aliansi Keamanan yang dikemukakan oleh Glenn Snyder.

Dalam hubungan internasional, aliansi dibentuk karena adanya interaksi di antara negara yang berdaulat yang didorong oleh kepentingan nasionalnya. Menurut Stephen Walt, negara melindungi diri mereka dari negara atau aliansi yang dinilai memiliki kekuatan yang mengancam. Ketika dihadapkan pada ancaman eksternal yang signifikan, negara dapat memilih untuk menyeimbangkan dirinya atau mengikuti kekuatan tersebut. Menyeimbangkan diri diartikan sebagai bersekutu membentuk aliansi untuk melawan ancaman yang ada. Sebagian besar tujuan utama dari dibentuknya aliansi adalah untuk menggabungkan kekuatan negara yang beraliansi dengan cara meningkatkan kepentingannya masing-masing.¹² Selain itu, Glenn Snyder juga mengatakan tujuan dibentuknya aliansi adalah harapan dari negara yang beraliansi bahwa negara sekutunya akan akan membantu mereka pada saat terjadinya konflik.¹³ Dengan kata lain, aliansi merupakan sebuah alat atau perpanjangan tangan vital dari sebuah negara dalam membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan mereka, dan dengan demikian dapat menjaga keamanan dan kelangsungan hidup mereka dalam sistem internasional yang anarkis.

¹² Walt, Stephen M. "Alliance formation and the balance of world power." *International security* 9,4 (1985): 3-43.

¹³ Snyder, Glenn H. "Alliance politics". Cornell University Press. 2007

Lebih jauh lagi Glenn Snyder dalam karyanya yang berjudul “The Security Dilemma in Alliance Politics” menjelaskan bahwa negara seringkali mengalami dilema dalam dua fase yaitu fase pertama saat aliansi dibentuk dan fase kedua saat negara harus menunjukkan seberapa kuat dukungannya terhadap negara dalam suatu konflik. Pada fase pertama, dilema yang dialami oleh setiap negara mempunyai dua bentuk yaitu untuk mencari sekutu atau menjauhkan diri dari hubungan aliansi. Aliansi akan terbentuk jika negara tidak puas dengan hanya memiliki keamanan yang moderat dan negara takut bahwa negara lain membentuk aliansi sehingga negara tersebut menjadi terisolasi. Begitu aliansi terbentuk, dilema fase kedua mengambil bentuk yang berbeda. Dimana pilihan mereka tidak lagi untuk membentuk aliansi atau tidak melainkan seberapa kuat komitmen mereka kepada negara sekutunya dalam interaksi konflik tertentu.

Dalam fase kedua ini, disebut bahwa negara mempunyai 2 pilihan strategi yaitu untuk ‘cooperate’ atau bekerja sama dan ‘defect’ atau membelot. Kerjasama berarti menunjukkan komitmen yang kuat dan dukungan penuh dalam konflik dan membelot berarti komitmen yang lemah dan tidak mendukung dalam konflik. Namun setiap strategi ini datang dengan konsekuensinya sendiri yaitu, munculnya ketakutan akan diabaikan atau ‘fear of abandonment’ dan terjebak atau ‘fear of entrapment’. Ketakutan akan terjebak terjadi jika kepentingan negara tidak sama dengan kepentingan sekutunya sehingga negara terseret ke dalam konflik dengan kepentingan berbeda dan juga jika negara memberikan komitmen yang kuat serta tingkat ketergantungan yang tinggi pada sekutunya maka konsekuensi akan terjebak akan lebih mungkin terjadi.

Negara yang mengimplementasikan strategi kerjasama (C) atau skenario dimana negara tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap negara sekutunya akan mengurangi konsekuensi akan ditinggalkan karena negara sekutu akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap dukungannya sehingga mencegah mereka untuk meninggalkan aliansi. Dalam strategi ini negara akan mendapatkan keuntungan yaitu peningkatan keamanan dan perlindungan. Namun konsekuensi dari strategi ini adalah terjebak dalam konflik negara sekutunya dan membatasi kebebasan negara untuk bertindak. Sebaliknya, negara yang mengimplementasikan strategi membelot atau skenario dimana negara menunjukkan komitmen yang lemah dan ambigu akan mengurangi konsekuensi dari terjebak dan kebebasan karena negara tidak harus menyesuaikan tindakan dan keputusan berdasarkan negara sekutunya. Namun, tentu saja strategi ini akan meningkatkan konsekuensi pengabaian karena negara sekutu akan meragukan hubungan aliansi

Dalam kata lain, kedua konsekuensi ini tidak dapat dihindarkan, dengan mengurangi salah satunya akan meningkatkan konsekuensi lainnya sehingga menciptakan sebuah dilema aliansi. Dengan demikian, penyelesaian dilema keamanan aliansi memerlukan perbandingan dan pertukaran antara biaya dengan konsekuensi akan pengabaian dan pengebakan.

Untuk menentukan strategi yang akan diambil, Snyder menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang dapat menjadi landasan bagi negara. Kelima faktor tersebut adalah :

1. Seberapa besar mereka membutuhkan bantuan satu sama lain dan persepsi mereka mengenai ketergantungan terhadap satu sama lain. Maka semakin bergantung negara tersebut dan sebaliknya jika negara sekutu terlihat tidak bergantung kepadanya maka semakin besar juga ketakutannya akan ditinggalkan dibandingkan dengan ketakutan akan terjebak. Untuk menilai ketergantungan ini, Snyder memberikan empat penilaiam yaitu (1) kebutuhan negara akan bantuan dalam sebuah konflik karena kekuatan militer mereka yang lemah. semakin rendah kemampuan militernya, semakin negara tersebut akan mencari bantuan dari sekutunya pada saat konflik terjadi. (2) kapasitas dari negara sekutunya untuk memberikan bantuan atau dukungan, semakin besar kekuatan negara sekutunya maka semakin negara tersebut akan bergantung pada sekutunya. (3) tingkat konflik dan ketengangan dengan musuh, semakin besar konflik dan ketegangan yang dihadapi oleh negara maka semakin besar kemungkinan negara akan meminta bantuan dari sekutunya. (4) pilihan alternatif untuk membentuk aliansi baru, semakin banyak pilihan alternatif negara untuk beraliansi dengan negara lain maka semakin sedikit ketergantungannya pada negara sekutunya saat ini. Negara dengan ketergantungan yang besar akan lebih rentan terhadap ketakutan akan ditinggalkan.
2. Faktor lain, adalah tingkat kepentingan strategis yang dimiliki oleh negara dalam membela satu sama lain. Berbeda dengan ketergantungan sebelumnya, faktor ini merujuk bukan pada kebutuhan akan bantuan jika salah satu negara diserang melainkan lebih kepada kebutuhan untuk

memblokir peningkatan kekuatan musuh. Kepentingan strategis mengacu pada kepentingan untuk menjauhkan sumber daya sekutu dari tangan lawan. Kepentingan strategis bisa juga disebut sebagai "ketergantungan tidak langsung", dan kebutuhan akan bantuan sekutu bisa disebut "ketergantungan langsung". Namun, bisa saja negara mempunyai derajat ketergantungan yang berbeda karena faktor geografis dan perbedaan kekuatan antara sekutu. Mengenai ketergantungan tidak langsung ini, jika negara memiliki kepentingan strategis yang lebih besar dibandingkan negara lainnya, maka akan semakin takut akan ditinggalkan.

3. Faktor ketiga adalah tingkat ketegasan dalam kesepakatan aliansi. Kesepakatan yang tidak jelas atau ambigu akan cenderung meningkatkan ketakutan akan ditinggalkan, dan kesepakatan yang eksplisit akan meminimalkan ketakutan seperti itu, tetapi tidak semata-mata akan menghilangkannya. Tetapi jika kesepakatan itu ambigu, negara mungkin merasa perlu untuk berdiri di samping negara sekutunya dalam segala situasi untuk membuktikan kesetiaan mereka. Namun, pada dasarnya, faktor ketegasan dalam perjanjian hanyalah pengubah efek dari faktor ketergantungan dan kepentingan yang lebih mendasar. Ketidakjelasan memungkinkan faktor-faktor ini bermain penuh dan ketegasan cenderung menghambat efeknya.
4. Faktor keempat merupakan faktor yang mempengaruhi ketakutan akan ditinggalkan atau terperangkap yaitu sejauh mana kepentingan negara sekutu yang berkonflik dibagi dengan negara. Jika kepentingan-kepentingan ini

serupa dan dihargai dengan intensitas yang kurang lebih sama, kedua ketakutan tersebut akan diminimalkan bagi kedua belah pihak, karena keduanya akan sama-sama siap untuk memperebutkannya. Di sisi lain, tingkat kepentingan mereka sangat berbeda maka negara akan khawatir akan terjebak.

5. Faktor terakhir adalah perilaku negara sekutu di masa lalu, hal ini lebih bersifat situasional daripada perilaku. Faktor ini hanya akan memberikan penilaian umum mengenai reputasi dan loyalitas negara sekutu. Ekspektasi mengenai perilaku negara sekutu di masa depan tidak dapat diperoleh dengan tepat hanya dari faktor-faktor sebelumnya sehingga bukti perilaku melingkupi elemen situasional untuk menghasilkan ekspektasi yang lebih spesifik dan percaya diri. Tentu saja, perilaku negara sekutu baru-baru ini mungkin merupakan tanggapan atas perilaku sebelumnya. Intinya adalah bahwa urutan pilihan strategis yang berkelanjutan oleh semua aktor menghasilkan aliran bukti perilaku yang berinteraksi dengan perkiraan faktor situasional umum ketika para pihak menilai kemungkinan konsekuensi dari opsi strategi saat ini.

Faktor-faktor ini merupakan penentu utama dari strategi yang akan diambil negara dan juga menjadi pertimbangan akan konsekuensi yang akan dilalui oleh negara. Jadi, jika suatu negara merasa sangat bergantung pada sekutunya, secara langsung atau tidak langsung, jika ia menganggap sekutunya kurang bergantung, jika komitmen aliansi tidak jelas, dan jika perilaku sekutu baru-baru ini menunjukkan kesetiaan yang diragukan, negara akan lebih takut ditinggalkan

daripada terjebak. Oleh karena itu, negara akan cenderung memilih strategi kerjasama (C) dengan meyakinkan sekutu tentang komitmennya dan mendukungnya dalam konflik. Kondisi sebaliknya akan cenderung menimbulkan strategi yang berlawanan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan mencoba membagi penulisan berdasarkan 2 fokus utama. Pertama, akan membahas mengenai latar belakang yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan Rodrigo Duterte untuk mengakhiri perjanjian Visiting Force Agreement dengan Amerika, kedua akan menganalisis dilema yang muncul karena ditanggukannya keputusan untuk mengakhiri perjanjian Visiting Force Agreement menggunakan teori Dilema Aliansi Keamanan dengan melihat lebih jauh determinan dan fakta yang mendukung untuk merangkai sebuah variabel yang berkontribusi dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dengan menganalisis determinan dan pilihan yang dipilih Rodrigo Duterte, kita dapat melihat bagaimana negara bertindak jika ditempatkan dalam posisi antara dua kekuatan besar.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Selama penelitian berlangsung, penulis akan menggunakan model penelitian kualitatif. Biklen dan Bogdan mengatakan model kualitatif mempunyai beberapa karakteristik diantaranya adalah lebih menekankan pada proses dibandingkan dengan hasil produk maka model ini dapat membantu melihat

hubungan antar variabel secara interaktif yaitu saling mempengaruhi.¹⁴ Mengingat bahwa penelitian akan menganalisa proses pembuatan keputusan dan faktor yang mempengaruhi di dalamnya.

Kemudian, penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif dikarenakan penelitian ini akan terdiri dari kutipan kutipan data dari beberapa data kepustakaan dikombinasikan dengan teori yang ada. Penulis akan menggunakan teori-teori yang relevan untuk membantu upaya analisis sehingga dapat mencapai sebuah kesimpulan.¹⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan studi dokumen yang terkait dengan permasalahan didapatkan dari jurnal dari berbagai pakar mengenai masalah yang diangkat, buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik dan situs-situs internet dengan informasi terbaru. Pengumpulan data akan terbagi menjadi dua yaitu, primer dan sekunder sebagai sumber pendukung penulisan. Data primer didapatkan dari perjanjian resmi antara kedua pihak terkait, publikasi resmi negara, dan laporan kejadian. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan studi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, dan tesis), media elektronik (artikel, berita, laporan, dan internet)

¹⁴ Biklen, Knopp S., Bogdan Robert. *“Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods”*. University of California. 2017

¹⁵ Suryadi, Umar. *“Metode Penelitian Hubungan Internasional”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017

1.7 Sistematika Pembahasan

- **BAB I** berisi **Pendahuluan** yang akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.
- **BAB II** akan meninjau secara umum hubungan antara Filipina dengan Amerika dan China, mengenai Visiting Force Agreement dan posisi Filipina di dalam perjanjian. Kemudian penulis akan mengelaborasi lebih jauh latar belakang dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keputusan Rodrigo Duterte untuk mengakhiri Visiting Force Agreement.
- **BAB III** Penulis akan menganalisis apa yang menjadi faktor pertimbangan bagi Rodrigo Duterte dan bagaimana proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan sehingga ditanggungkannya keputusan untuk mengakhiri Visiting Force Agreement dengan menggunakan teori Dilema Aliansi Keamanan oleh Glenn Snyder.
- **BAB IV** berisi **Kesimpulan** dari penelitian, yang berisikan rangkuman jawaban atas rumusan masalah.